

**STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
SUMATERA BARAT DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
DAN NETRALITAS LEMBAGA PENYIARAN PADA
PEMILU 2024 DI SUMATERA BARAT**

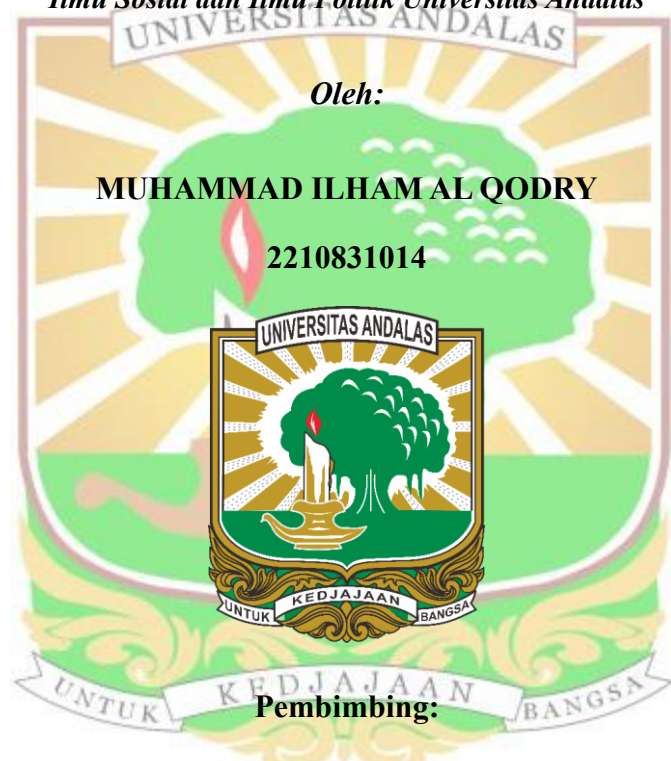
SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM AL QODRY

2210831014



Pembimbing:

**Dr. Irawati, MA
Dr. Indah Adi Putri, MIP**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran lembaga pengawas penyiaran dalam menjaga netralitas dan kepatuhan lembaga penyiaran selama penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini didasarkan pada adanya pelanggaran penyiaran pada Pemilu Legislatif 2024. Namun, pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 tidak ditemukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan strategi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Fokus utama penelitian ini pada strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran pada Pemilu 2024 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Koteen sebagai pisau analisis yang menggunakan empat variabel yaitu: strategi organisasi (*corporate strategy*), strategi program (*program strategy*), strategi pendukung sumber daya (*resource support strategy*) dan strategi kelembagaan (*institutional strategy*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi organisasi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Barat dilakukan dengan penerapan strategi promotif, persuasif dan kuratif. Strategi tersebut menjadi pendekatan utama yang dilakukan KPID Sumatera Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan netralitas lembaga penyiaran. Strategi program yang dijalankan berupa kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, serta program Sekolah P3SPS. Strategi pendukung sumber daya diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan keuangan dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran. Strategi kelembagaan yang diterapkan oleh KPID Sumatera Barat tercermin melalui struktur organisasi, penerapan standar operasional prosedur, serta mekanisme koordinasi KPID Sumatera Barat dengan KPU dan BAWASLU dalam memperkuat pengawasan penyiaran pada Pemilu 2024 di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Strategi, Netralitas dan Kepatuhan, Pengawasan Penyiaran, Pemilu 2024

ABSTRACT

This research is motivated This study is motivated by the importance of the role of broadcasting regulatory authorities in maintaining the neutrality and compliance of broadcasting institutions during the electoral process. It is based on the existence of broadcasting violations during the 2024 Legislative Election. However, no violations were found during the 2024 Regional Head Election. This indicates the success of certain strategies that need to be further analyzed. The main focus of this research is the strategy of the Regional Indonesian Broadcasting Commission of West Sumatra in improving the compliance and neutrality of broadcasting institutions during the 2024 Election in West Sumatra. This study employs Koteen's strategic theory as an analytical framework, which consists of four variables: corporate strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques include interviews and documentation. The results of this study show that the organizational strategy implemented by the West Sumatra Broadcasting Commission is carried out through promotive, persuasive, and curative approaches. These strategies serve as the main approach in enhancing the compliance and neutrality of broadcasting institutions. The program strategies are implemented through socialization activities, technical guidance, workshops, and the P3SPS School program. Resource support strategies are realized through the utilization of human resources, facilities and infrastructure, as well as financial support in supervising broadcast content. Meanwhile, the institutional strategy is reflected in the organizational structure, the implementation of standard operating procedures, and the coordination mechanisms between the West Sumatra Broadcasting Commission, the General Election Commission (KPU), and the Election Supervisory Agency (BAWASLU) in strengthening broadcast supervision during the 2024 Election in West Sumatra.

Keywords: Strategy, Neutrality and Compliance, Broadcasting Supervision, 2024 General Election.